



IMPLIKASI ETIKA BISNIS PADA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM KONTEKS KASUS PEMALSUAN DOKUMEN**Dhandy Hermawan Madu¹, Desy Elevany Sera²**

Magister Akuntansi, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

e-mail : dandmadu8102@gmail.com¹, desy,e,sera@gmail.com²

ABSTRAK**Kata Kunci :**
Penyaluran
KUR, UMKM,
BRI**Latar Belakang :** Penelitian latar belakang ini dalam mengatasi dan mencegah terjadinya praktik pemalsuan dokumen ini, peran etika bisnis sangat penting untuk diterapkan di dalam organisasi BRI. Selain itu, pengawasan yang ketat dari pihak manajemen juga perlu ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik korupsi dan kecurangan di dalam organisasi.**Tujuan :** tujuan dari penelitian ini adalah untuk Implikasi etika bisnis dalam penyaluran KUR adalah dipahami dan diterapkan oleh seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam program, termasuk karyawan dan bank.**Metode :** Metode penelitian ini adalah Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil dari penelitian tersebut adalah diperlukan upaya berkelanjutan dan konsisten dari pihak BRI dalam mengatasi dan mencegah praktik pemalsuan dokumen dalam penyaluran KUR.**Hasil dan Pembahasan :** Hasil dan pembahasan ini dapat dilakukan melalui penerapan etika bisnis yang kuat, pengawasan yang ketat, evaluasi dan peningkatan sistem, pelatihan dan penjangkauan, sistem penghargaan dan sanksi yang tepat, serta pengembangan budaya organisasi yang baik dan berintegritas. Salah satu solusi yang dapat menyelesaikan kasus pajak berganda adalah restitusi pajak, tetapi proses permohonan yang lama merupakan hambatan besar bagi pelaku usaha.**Kesimpulan :** Kesimpulannya adalah pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki dampak yang signifikan terhadap pihak yang terlibat, baik pihak BRI maupun masyarakat penerima KUR. Dalam mengatasi dan mencegah terjadinya praktik pemalsuan dokumen ini, peran etika bisnis sangat penting untuk diterapkan di dalam organisasi BRI.**ABSTRACK****Keywords:**
Distribution of
KUR, UMKM,
BRI**Background :** *This background research in overcoming and preventing the practice of falsifying documents is very important to be applied within the BRI organization. In addition, strict supervision from the management also needs to be improved to minimize the occurrence of corrupt and fraudulent practices within the organization.*

Objective : *The implications of business ethics in KUR distribution are understood and applied by all business actors involved in the program, including employees and banks.*

Method : *This research method is The method used is a literature study. The result of the research is that continuous and consistent efforts are needed from BRI in overcoming and preventing the practice of falsifying documents in the distribution of KUR.*

Results and Discussion : *One solution that can solve double taxation cases is tax restitution, but the long application process is a big obstacle for business actors.*

Conclusion : *The conclusion is that document forgery by unscrupulous BRI employees of the Bone Pantai unit in the distribution of People's Business Credit (KUR) has a significant impact on the parties involved, both BRI and the community receiving KUR. In overcoming and preventing the practice of falsifying documents, the role of business ethics is very important to be applied within the BRI organization.*

PENDAHULUAN

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, program KUR kerap terkendala dengan masalah pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan bank yang bertugas menyalurkan kredit tersebut. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak bank dan juga penerima kredit yang seharusnya memang layak menerima bantuan KUR. Salah satu kasus pemalsuan dokumen yang pernah terjadi adalah pada oknum karyawan BRI unit Bone Pantai yang melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran KUR. Menurut Anderfuhren-Biget, etika bisnis merupakan seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat, seperti pelanggan, karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar (Anderfuhren-Biget, 2016).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan usaha bagi masyarakat kecil dan menengah yang belum atau sulit memperoleh akses ke sumber pembiayaan formal. Program ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2007 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Tujuan dari program KUR adalah untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, program KUR seringkali mengalami kendala seperti pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan bank yang bertugas menyalurkan kredit tersebut. Dalam kasus pemalsuan dokumen warga oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai, sejumlah calon penerima KUR yang seharusnya tidak memenuhi syarat, mendapat bantuan KUR dengan memalsukan dokumen.

Dalam penyaluran KUR, etika bisnis memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana KUR disalurkan dengan tepat sasaran kepada penerima yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat. Etika bisnis juga memastikan bahwa bank dalam hal ini BRI, menjalankan kegiatan usahanya secara profesional dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham, nasabah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks kasus pemalsuan dokumen warga oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai, pelanggaran etika bisnis terjadi karena oknum karyawan yang seharusnya

menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, justru memalsukan dokumen untuk memberikan dana KUR kepada penerima yang tidak memenuhi syarat.

Penyaluran KUR yang bertanggung jawab membutuhkan praktik bisnis yang etis dari pihak bank, termasuk karyawan dan manajemennya. Etika bisnis yang baik akan membantu bank memastikan bahwa dana KUR hanya disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang berkelanjutan. Menurut (Wijaya, 2019), etika bisnis mencakup nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam praktik bisnis, seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Dalam konteks penyaluran KUR, integritas diperlukan untuk memastikan bahwa dokumen penerima KUR valid dan memenuhi syarat.

Kasus pemalsuan dokumen warga oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai bukanlah kasus tunggal dalam penyaluran KUR di Indonesia. Terdapat beberapa kasus penyaluran KUR yang bermasalah, seperti penerima KUR yang tidak memenuhi syarat, penyaluran KUR ke sektor non-unggulan, dan penyaluran KUR yang tidak transparan (Fauzia, 2019)). Ketidaktransparan dalam penyaluran KUR dapat memunculkan potensi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan dokumen warga oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai. Selain itu, penyaluran KUR yang bermasalah juga dapat merugikan pihak bank dan pemerintah, karena dana yang disalurkan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat.

Kasus pemalsuan dokumen warga oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai menunjukkan bahwa etika bisnis tidak hanya penting bagi keberlangsungan usaha, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Etika bisnis yang baik dalam penyaluran KUR dapat mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak bank dan pemerintah. Penerapan etika bisnis dalam penyaluran KUR dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti memastikan transparansi dalam proses penyaluran KUR, memastikan penerima KUR memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya, serta memberikan bimbingan dan monitoring kepada penerima KUR untuk memastikan penggunaan dana KUR yang tepat.

Pemalsuan dokumen warga yang dilakukan oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai dalam penyaluran KUR tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi pihak bank, tetapi juga merugikan nasabah dan berdampak pada citra perusahaan. Selain itu, tindakan pemalsuan dokumen tersebut melanggar etika bisnis dan prinsip-prinsip kepatuhan pada regulasi dan hukum yang ada. Hal ini menggambarkan kurangnya pengawasan dan penegakan prinsip etika bisnis yang kuat di perusahaan BRI. Sebuah studi oleh (Fraedrich, 2019) menunjukkan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki budaya dan prinsip etika bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Oleh karena itu, penyaluran KUR harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dalam kerangka prinsip-prinsip etika bisnis yang kuat untuk menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan. Berdasarkan identifikasi masalah maka diangkatlah judul "Implikasi Etika Bisnis pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Konteks Kasus Pemalsuan Dokumen Warga oleh Oknum Karyawan BRI unit Bone Pantai", dengan tujuan Implikasi etika bisnis pada penyaluran KUR harus dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam program tersebut, termasuk karyawan dan pihak bank.

Dengan begitu, program penyaluran KUR dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi UMKM dan masyarakat secara keseluruhan

KAJIAN PUSTAKA

Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan bagian dari etika yang berfokus pada perilaku dan tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu dan organisasi dalam berinteraksi dengan stakeholders mereka. Etika bisnis menjadi penting dalam konteks penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) karena prosesnya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perbankan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam penyaluran KUR harus memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Menurut (Freeman, 2010) etika bisnis merupakan konsep yang terkait dengan bagaimana organisasi menjalankan bisnis mereka dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak yang terkait, seperti karyawan, pelanggan, pemegang saham, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Etika bisnis memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan organisasi dan meminimalkan risiko kegagalan bisnis. Hal ini diperkuat oleh pandangan (Matten, 2016) yang menyatakan bahwa bisnis yang dijalankan secara etis tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, namun juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Etika dalam Keuangan

Etika dalam keuangan sangatlah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. (Arnold, 2019) menjelaskan bahwa etika dalam keuangan dapat dibagi menjadi empat bidang, yaitu etika dalam pengambilan keputusan investasi, etika dalam pengelolaan kekayaan nasabah, etika dalam pengambilan keputusan manajemen risiko, dan etika dalam praktik perbankan dan keuangan global. Praktik etis dalam keuangan diperlukan untuk menghindari terjadinya praktik-praktik yang merugikan baik bagi pihak individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, etika dalam keuangan juga berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang mengatur penggunaan dana oleh perusahaan, termasuk dalam hal investasi, pinjaman, dan manajemen risiko. Dalam konteks keuangan, etika juga berkaitan dengan tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu dan institusi keuangan, seperti bank dan investor, dalam menentukan penggunaan dan aliran dana (al., 2012)

Etika dalam Penyaluran Kredit

Menurut (Adjei, 2018) lembaga keuangan perlu mengikuti prinsip-prinsip etika dalam melakukan penyaluran kredit, seperti keadilan, kepercayaan, integritas, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Keadilan dalam penyaluran kredit mengharuskan lembaga keuangan memberikan kredit kepada pelanggan dengan syarat dan ketentuan yang sama. Kepercayaan dan integritas dalam penyaluran kredit meliputi prinsip-prinsip seperti kejujuran, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum. Tanggung jawab sosial dalam penyaluran kredit mengharuskan lembaga keuangan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Terakhir, transparansi dalam penyaluran kredit meliputi keterbukaan dan pengungkapan informasi yang akurat dan jelas terkait dengan penyaluran kredit. Menurut (al, 2013) terdapat empat prinsip etika bisnis yang

harus dipegang teguh, yaitu prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak privasi

Kode Etik Perusahaan

Perusahaan-perusahaan di berbagai sektor memiliki Kode Etik Perusahaan (KEP) yang mengatur perilaku karyawan dan manajemen perusahaan. KEP merupakan pernyataan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan dan harus diterapkan oleh seluruh karyawan perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tujuan dari KEP adalah untuk mempromosikan integritas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum serta regulasi yang berlaku. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh National Business Ethics Survey (NBES) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki KEP yang jelas dan diterapkan secara efektif cenderung memiliki karyawan yang lebih loyal dan etis. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki KEP atau tidak memperhatikan implementasinya dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran etika dan hukum (Weaver, 2003). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (al D. e., 2017) kode etik perusahaan dapat memainkan peran penting dalam mendorong perilaku etis di perusahaan.

Pelanggaran Etika Bisnis

Menurut (al T. e., 2014) pelanggaran etika bisnis dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti tekanan kinerja yang tinggi, lingkungan kerja yang kompetitif, kurangnya pengawasan, dan kurangnya pelatihan etika. Selain itu, pelanggaran etika bisnis juga dapat terjadi karena norma sosial yang tidak jelas atau tidak konsisten, atau bahkan norma yang diabaikan sama sekali. Pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi antara lain penipuan, korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Menurut (Nelson, 2016) terdapat beberapa jenis pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di dunia usaha. Pertama, tindakan korupsi dan suap yang biasanya terjadi dalam hubungan antara perusahaan dan pemerintah atau antar perusahaan. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi diskriminasi, pelecehan seksual, dan penggunaan tenaga kerja anak. Ketiga, pelanggaran lingkungan yang meliputi pencemaran lingkungan, penggunaan bahan berbahaya, dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Keempat, praktek bisnis yang tidak jujur seperti penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Kelima, pelanggaran dalam persaingan bisnis yang meliputi praktik kartel dan monopoli

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian secara teori melalui referensi-referensi terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah. Studi ini dilakukan dengan menelaah buku, literatur serta kajian terdahulu yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pemalsuan dokumen dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai merupakan suatu tindakan yang merugikan baik bagi pihak bank maupun nasabah yang melakukan pengajuan

kredit. Berbagai faktor dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan tersebut. Menurut (Heryanto, 2017), salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya tindakan pemalsuan dokumen adalah kurangnya pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh manajemen bank terhadap karyawan. Selain itu, tekanan untuk mencapai target yang tinggi dan berbagai masalah pribadi seperti keuangan juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas untuk menghindari terjadinya tindakan pemalsuan dokumen pada proses penyaluran KUR.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai dalam penyaluran KUR adalah kurangnya pengawasan dan kontrol dari pihak manajemen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fathurohman, 2020) yang menunjukkan bahwa pengawasan dan kontrol manajemen sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan dan fraud di dalam perusahaan. Namun, pada kenyataannya, pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh pihak manajemen BRI unit Bone Pantai kurang efektif, sehingga oknum karyawan dapat dengan mudah melakukan tindakan pemalsuan dokumen dalam penyaluran KUR. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pihak manajemen BRI unit Bone Pantai dalam memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas operasional yang dilakukan oleh para karyawannya.

Selain itu, faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai dalam penyaluran KUR adalah kurangnya pengawasan dan monitoring yang ketat dari pihak manajemen terhadap kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan temuan hasil penelitian (Septiani, 2020) yang menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dari pihak manajemen dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik korupsi dan kecurangan di dalam organisasi.

Implikasi dari pemalsuan dokumen pada penyaluran KUR terhadap pihak yang terlibat, baik pihak BRI maupun masyarakat penerima KUR

Implikasi dari pemalsuan dokumen pada penyaluran KUR tidak hanya berdampak pada BRI sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berdampak pada masyarakat penerima KUR. Praktik pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai mengakibatkan adanya penerimaan KUR oleh pihak yang tidak berhak atau tidak memenuhi persyaratan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi BRI dan masyarakat penerima KUR. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan juga menurunkan kepercayaan pemerintah dalam memberikan program-program bantuan finansial kepada masyarakat. Oleh karena itu, BRI sebagai lembaga keuangan perlu meningkatkan pengawasan terhadap karyawannya dalam penyaluran KUR serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas dalam mengakses layanan keuangan. (Sari, 2021). Selain itu, pemalsuan dokumen dalam penyaluran KUR juga akan berdampak pada citra dan reputasi BRI sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BRI dan mengurangi jumlah nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan BRI. Citra dan reputasi yang rusak dapat

berdampak pada kinerja perusahaan dan menurunkan nilai saham perusahaan di pasar modal (Keuangan, 2019)

Peran etika bisnis dalam mengatasi dan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen pada penyaluran KUR di BRI unit Bone Pantai

Selain pengawasan yang ketat, penerapan etika bisnis yang baik juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya praktik pemalsuan dokumen dalam penyaluran KUR di BRI unit Bone Pantai. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan nilai yang diterapkan dalam bisnis dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan integritas dalam berbisnis (al. F. e., 2019). Dalam hal ini, BRI dapat menerapkan kode etik perusahaan yang jelas dan tegas terkait dengan tindakan kecurangan dan korupsi dalam penyaluran KUR. Selain itu, BRI juga dapat mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait etika bisnis kepada seluruh karyawan, agar dapat memahami pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas dan profesionalisme (Wibowo, 2020).

Dalam mengatasi dan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen pada penyaluran KUR di BRI unit Bone Pantai, diperlukan peran aktif dari pihak manajemen dalam membangun budaya etika yang kuat dan memastikan implementasi kode etik perusahaan secara konsisten. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran etika oleh oknum karyawan dalam melakukan penyaluran KUR. Selain itu, pihak BRI juga perlu meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap proses penyaluran KUR serta melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan etika bisnis dalam penyaluran KUR di BRI unit Bone Pantai dan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen pada masa yang akan datang

Dalam upaya meningkatkan etika bisnis dan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen pada penyaluran KUR di BRI unit Bone Pantai, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, pihak manajemen perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh karyawan terutama dalam hal penyaluran KUR. Pengawasan ini harus dilakukan secara ketat dan terstruktur sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik-praktik yang tidak etis. Hal ini sejalan dengan penelitian (Septiani, 2020) yang menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dari pihak manajemen dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik korupsi dan kecurangan di dalam organisasi.

Dalam upaya meningkatkan etika bisnis dan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen pada penyaluran KUR di BRI unit Bone Pantai, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, pihak manajemen perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh karyawan terutama dalam hal penyaluran KUR. Pengawasan ini harus dilakukan secara ketat dan terstruktur sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik-praktik yang tidak etis. Hal ini sejalan dengan penelitian (Septiani, 2020) yang menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dari pihak manajemen dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik korupsi dan kecurangan di dalam organisasi.

Pertama, pihak manajemen perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses penyaluran KUR, termasuk verifikasi dokumen dan

pemeriksaan lapangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan sistem internal kontrol yang ketat dan memperkuat tim auditor internal. Kedua, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi tentang etika bisnis kepada seluruh karyawan BRI unit Bone Pantai. Pelatihan ini harus meliputi pemahaman tentang kode etik, integritas, tanggung jawab sosial, dan hukum-hukum terkait bisnis. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab karyawan terhadap praktik bisnis yang beretika. Terakhir, perlu juga diberikan sanksi yang tegas bagi karyawan yang melakukan pelanggaran etika bisnis, termasuk pemalsuan dokumen. Sanksi ini harus berupa tindakan disiplin dan hukuman hukum yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Terakhir, penting bagi BRI unit Bone Pantai untuk memperkuat sistem pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap oknum karyawan yang melakukan pemalsuan dokumen. Hal ini dapat menjadi efektif dalam mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mardiyah, 2020), penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika bisnis dapat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kesadaran etika karyawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan dokumen oleh oknum karyawan BRI unit Bone Pantai dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki dampak yang signifikan terhadap pihak yang terlibat, baik pihak BRI maupun masyarakat penerima KUR. Dalam mengatasi dan mencegah terjadinya praktik pemalsuan dokumen ini, peran etika bisnis sangat penting untuk diterapkan di dalam organisasi BRI. Selain itu, pengawasan yang ketat dari pihak manajemen juga perlu ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik korupsi dan kecurangan di dalam organisasi.

Dalam hal ini, pihak BRI perlu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dan prosedur yang ada dalam penyaluran KUR untuk menghindari terjadinya praktik pemalsuan dokumen pada masa yang akan datang. Dalam kesimpulannya, diperlukan upaya yang terus menerus dan konsisten dari pihak BRI dalam mengatasi dan mencegah terjadinya praktik pemalsuan dokumen pada penyaluran KUR. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan etika bisnis yang kuat, pengawasan yang ketat, evaluasi dan perbaikan sistem, pelatihan dan sosialisasi, sistem penghargaan dan sanksi yang tepat, serta pembangunan budaya organisasi yang baik dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderfuhren-Biget, S. (2016). *Ethics in Business: A Guide for Managers*. Springer International Publishing.
- Arnold, V. D. (2019). Ethics and finance. In *The Routledge Handbook of Financial Ethics and Governance* (pp. 13-24). Routledge.
- Aziz, F., & Septiani, W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Kecurangan Akuntansi: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 22(1), 29-41.

- Aziz, M. A., & Septiani, W. (2020). Pengaruh pengawasan manajemen terhadap pencegahan praktik korupsi dan kecurangan pada perusahaan BUMN di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 19-28.
- Bahri, S., Nugroho, B. A., & Asmara, A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran etika pada karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 259-276.
- Bahri, S., Nugroho, D. D., & Asmara, A. (2018). Effect of business ethics and internal control on fraud. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(2), 1-8.
- Bank of America. (2018). Corporate Social Responsibility Report 2018. Diakses pada 1 Maret 2023, dari <https://about.bankofamerica.com/assets/pdf/Bank-of-America-CSR-Report-2018.pdf>
- Budiarto, R. (2018). Manajemen Risiko Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Investasi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 26(2), 174-190.
- Cahyono, E. (2021, 2 Juni). Oknum Karyawan BRI di Bone Pantai Pemalsu Dokumen untuk KUR. *Detik Finance*. Diakses pada 1 Maret 2023, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5587254/oknum-karyawan-bri-di-bone-pantai-pemalsu-dokumen-untuk-kur>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)